LAPORAN MAGANG PRIGEL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

"IMPLEMENTASI BI-SMART DALAM TATA KELOLA INOVASI DI KABUPATEN BOYOLALI"

Dosen Pembimbing Lapangan:

Jeane Fransina Diana Talakua, S.IP,M.Si

Disusun Oleh:

Mutiara Ramadani Utomo

7111422023

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan UNNES PRIGEL yang berjudul :

"Implementasi BI-SMART dalam Tata Kelola Inovasi di Kabupaten Boyolali", telah dilaksanakan dana dinilai oleh Dosen Pembimbing UNNES PRIGEL pada tanggal…… dan dinyatakan lulus.

Pendamping Lapangan PRIGEL,	Dosen Pembimbing UNNES
Oktaviana Dwi Saputri, S.E	Jeane Fransina Diana Talakua, S.E., M.Si.
NIP. 198910232014032001	NIP. 199201222024212010

Semarang, …….

Kaprodi Ekonomi Pembangunan

Dr. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si

NIP. 197705022008122001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya yang berjudul **"Implementasi BI-SMART dalam Tata Kelola Inovasi di Kabupaten Boyolali"**.

Laporan UNNES PRIGEL ini disusun berdasarkan hasil survei, observasi dan wawancara selama penulis melaksanakan magang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali. Hasil laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu karena selain hasil kerja penulis sendiri, juga berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara materi maupun spiritual kepada penulis, diantaranya dengan hormat:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun laporan magang.
2. Bapak Prof. Dr. Martono, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES).
3. Bapak Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNNES.
4. Ibu Dr. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNNES.
5. Ibu Jeane Fransina Diana Talakua, S.E., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Magang Prigel yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik selama pelaksanaan magang prigel.
6. Bapak M. Syawalludin, AP. M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali
7. Bapak Achmad Nasution, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada BAPPERIDA Kabupaten Boyolali yang telah memberikan arahan selama magang.

8. Ibu Oktaviana Dwi Saputri, S.E., selaku pendamping lapangan PRIGEL yang telah memberikan arahan dalam penyusunan laporan magang.
9. Keluarga besar Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali yang telah banyak membantu selama pelaksanaan magang.
10. Kedua orang tua penulis, saudara, teman penulis yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungan kepada penulis dalam proses pelaksanaan magang.
11. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses pelaksanaan magang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga penyusunan laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan penulis.

Boyolali , 22 Mei 2025

Mutiara Ramadani Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vi

RINGKASAN vii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan UNNES PRIGEL 5

1.4 Manfaat UNNES PRIGEL 5

BAB II 7

KAJIAN PUSTAKA 7

2.1 Inovasi Daerah 7

2.2 Teori Inovasi Schumpeter 8

2.3 Tata Kelola Inovasi 9

2.4 Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 9

2.5 Transformasi Digital Dalam Pemerintahan 10

2.6 Kerangka Berpikir 10

BAB III 13

METODE UNNES PRIGEL 13

3.1 Lokasi UNNES PRIGEL 13

3.2 Desain/ Rancangan UNNES PRIGEL 13

3.4 Metode pengumpulan data UNNES PRIGEL..... 21

3.5 Instrumen UNNES PRIGEL 22

3.6 Teknik analisis data UNNES PRIGEL 22

BAB IV.....24

HASIL UNNES PRIGEL DAN PEMBAHASAN.....24

4.1 Gambaran Umum Lokasi Magang 24

4.1.1 Profil Bapperida Kabupaten Boyolali..... 24

4.1.2 Visi dan Misi Bapperida Kabupaten Boyolali..... 25

4.1.3 Tugas dan Fungsi Bapperida Kabupaten Boyolali 25

4.1.5 Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Boyolali 26

4.2 Aktivitas Magang di Bapperida Kabupaten Boyolali..... 28

4.3 Implementasi serta Kendala system BI-SMART dalam Tata Kelola Inovasi di Kabupaten Boyolali 29

4.4 Efektivitas BI-SMART dalam Mendorong Partisipasi Perangkat Daerah dan Pelaporan Inovasi Secara Terintegrasi..... 35

4.5 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BI-SMART dalam mendukung tata Kelola inovasi berbasis bukti (Evidence-Based Policy)..... 37

BAB V 40

KESIMPULAN DAN SARAN 40

5.1 Kesimpulan..... 40

5.2 Saran 41

Daftar Pustaka 43

Lampiran 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 11
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Boyolali.....26
Gambar 4.2 Tampilan Awal BI-SMART.....30
Gambar 4.3 Berita di BI-SMART 31
Gambar 4.4 Ragam Fitur Komprehensif BI-SMART.....32

RINGKASAN

Laporan magang ini berjudul *"Implementasi BI-SMART dalam Tata Kelola Inovasi di Kabupaten Boyolali"* dan disusun berdasarkan pengalaman langsung penulis selama melaksanakan kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam peran sistem BI-SMART sebagai instrumen digital dalam mendukung tata kelola inovasi daerah yang efektif, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Metode yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara dengan pegawai bidang riset dan inovasi, dokumentasi kegiatan, serta studi pustaka yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa BI-SMART memiliki peran strategis dalam menyederhanakan proses pelaporan inovasi, meningkatkan partisipasi perangkat daerah, serta menyediakan data inovasi yang terstruktur dan dapat diakses secara real-time. Platform ini juga mendorong terbentuknya budaya inovatif di lingkungan birokrasi melalui fitur-fitur interaktif seperti katalog inovasi, pendampingan Krenova, dan forum kolaboratif.

Namun demikian, implementasi BI-SMART masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan literasi digital aparatur sipil negara, belum optimalnya integrasi data lintas perangkat daerah, dan rendahnya partisipasi masyarakat umum. Selain itu, infrastruktur teknologi dan mekanisme evaluasi berkala juga menjadi aspek yang perlu ditingkatkan agar sistem dapat berfungsi lebih maksimal.

Secara keseluruhan, BI-SMART merupakan terobosan penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi inovasi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi acuan bagi daerah lain dalam membangun ekosistem inovasi yang responsif dan partisipatif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Inovasi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mendorong lahirnya inovasi-inovasi strategis yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan. Inovasi daerah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik. Secara umum, inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat ini, kebutuhan akan inovasi tidak hanya menjadi pilihan tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk mampu beradaptasi dan melakukan perubahan yang berkelanjutan guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks (Rohman & Bakri, 2022).

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 22 Kecamatan, 261 Desa dan 6 Kelurahan serta.memiliki potensi unggulan di berbagai sektor, antara lain pertanian, peternakan, industri kecil dan menengah, hingga pariwisata. Untuk memaksimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi. Inovasi daerah tidak hanya menjadi sarana pengembangan kebijakan publik yang responsif dan adaptif, tetapi juga merupakan strategi dalam meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh. Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berbasis inovasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan berbagai regulasi yang mendukung ekosistem inovasi, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup peningkatan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Inovasi daerah juga menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui *Indeks Inovasi Daerah (IID)*.

Meskipun demikian, pengelolaan inovasi di Kabupaten Boyolali masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama terletak pada sistem manajemen data inovasi yang belum terintegrasi secara optimal. Pengumpulan dan pelaporan inovasi selama ini masih dilakukan melalui metode konvensional, seperti penggunaan *Microsoft Excel* dan *Google Form*, yang berisiko terhadap duplikasi data, keterlambatan pembaruan, serta keterbatasan akses publik terhadap informasi inovasi. Hal ini menyebabkan proses pemantauan, evaluasi, dan diseminasi inovasi menjadi kurang efektif. Fakta lainnya menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Boyolali telah meraih predikat “Inovatif” hingga “Sangat Inovatif” dalam *Indeks Inovasi Daerah* Kemendagri pada periode 2018–2022, jumlah inovasi yang berhasil dilaporkan setiap tahunnya masih tergolong rendah, yaitu di bawah 50 inovasi. Jumlah ini belum mencerminkan potensi maksimal yang dimiliki oleh seluruh perangkat daerah (OPD) di Boyolali, mengingat adanya peluang besar untuk melakukan inovasi di berbagai sektor pelayanan publik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis digital bernama BI-SMART (*Boyolali Innovation System Management of Research and Techbology)*. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah proses pendataan, pelaporan, serta pemantauan inovasi daerah secara terintegrasi, transparan, dan real-time. BI-SMART diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya inovasi di lingkungan birokrasi, serta meningkatkan efektivitas pelaporan inovasi kepada pemerintah pusat dan masyarakat. BI-SMART mulai di umumkan untuk pertama kali pada 10 Juli

2024.

Namun, implementasi BI-SMART dalam tata kelola inovasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi perangkat daerah dalam penginputan data, serta belum optimalnya pemanfaatan data yang tersedia untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi BI-SMART adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia di tingkat perangkat daerah. Banyak pegawai, khususnya di level operator, belum memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital ini. Ketimpangan kompetensi juga terlihat antara pegawai muda yang lebih melek teknologi dan pegawai senior yang masih gagap teknologi. Kondisi ini menciptakan ketergantungan pada individu-individu tertentu yang menguasai sistem, sehingga kontinuitas pemanfaatan BI-SMART menjadi tidak stabil. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendampingan teknis membuat pemahaman terhadap pentingnya data dan inovasi masih rendah. Akibatnya, sistem BI-SMART sering kali hanya digunakan sebagai alat pelaporan administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk mendukung tata kelola inovasi yang berbasis bukti.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi dari perangkat daerah dalam penginputan data ke dalam sistem BI-SMART. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum secara rutin dan konsisten melakukan input data yang diperlukan, sehingga menyebabkan ketidaklengkapan informasi dalam sistem. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya tidak adanya mekanisme insentif atau sanksi yang mengatur kepatuhan dalam pelaporan data, serta beban kerja pegawai yang sering kali membuat penginputan data dianggap sebagai tugas tambahan yang tidak prioritas. Selain itu, lemahnya koordinasi dan minimnya monitoring dari pihak pengelola sistem menyebabkan tidak adanya kontrol terhadap keterisian data. Hal ini berdampak langsung pada kualitas informasi yang tersedia, yang seharusnya menjadi dasar dalam mendukung pengambilan kebijakan.

Meskipun BI-SMART dirancang untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, kenyataannya pemanfaatan data yang tersedia dalam sistem masih jauh dari optimal. Data yang telah dikumpulkan belum diolah secara maksimal menjadi informasi yang relevan untuk proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena kurangnya integrasi antar basis data serta tidak adanya analisis lanjutan yang dapat menghasilkan insight strategis. Dalam praktiknya, penyusunan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Boyolali masih banyak mengandalkan pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan berdasarkan intuisi atau pengalaman masa lalu. Selain itu, lemahnya sinergi antara unit perencana dan pelaksana membuat alur informasi dari sistem BI-SMART tidak mengalir secara efektif ke tingkat pengambil kebijakan. Akibatnya, potensi besar BI-SMART sebagai alat pendukung tata kelola berbasis bukti belum sepenuhnya terwujud.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas BI-SMART dalam mendukung pengelolaan inovasi di Kabupaten Boyolali. Melalui kegiatan magang di Bapperida Kabupaten Boyolali, penulis berkesempatan untuk mengamati secara langsung proses implementasi BI-SMART, mengevaluasi capaian dan tantangannya, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat peran sistem ini dalam mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan dan berdampak. Dengan demikian, penulis mengambil judul "IMPLEMENTASI BI-SMART DALAM TATA KELOLA INOVASI DI KABUPATEN BOYOLALI" karena sistem ini menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan inovatif yang terstruktur dan kolaboratif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi system BI-SMART dalam tata Kelola inovasi di Kabupaten Boyolali serta apa saja kendala yang dihadapi?

2. Bagaimana efektivitas BI-SMART dalam mendorong partisipasi perangkat daerah dan pelaporan inovasi secara terintegrasi?
3. Apa saja Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BI-SMART dalam mendukung tata Kelola inovasi berbasis bukti (evidence-based policy)?

1.3 Tujuan UNNES PRIGEL

Tujuan dari pelaksanaan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai praktik tata kelola pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan inovasi daerah.
2. Mengamati secara langsung implementasi sistem BI-SMART sebagai alat bantu manajemen inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Mengidentifikasi proses kerja, peran kelembagaan, serta tantangan yang dihadapi Bapperida dalam pelaporan dan pengelolaan data inovasi.
4. Meningkatkan dan membangun keterampilan teknis dan administratif melalui keterlibatan dalam kegiatan instansi, seperti input data, dokumentasi inovasi, dan pelaporan.

1.4 Manfaat UNNES PRIGEL

1. Bagi Mahasiswa (Peserta Magang):
   1) Mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja birokrasi, khususnya di Bidang Perencanaan dan Inovasi Daerah.
   2) Meningkatkan kemampuan praktis, seperti penggunaan sistem informasi, pengolahan data, dan penulisan laporan kebijakan.
   3) Mengembangkan keterampilan komunikasi, koordinasi, dan adaptasi dalam lingkungan kerja profesional.
2. Bagi Instansi (Bapperida Kabupaten Boyolali)

1) Mendapatkan bantuan teknis dan administrative dari mahasiswa dalam kegiatan operasional, khususnya terkait input dan pendataan inovasi melalui BI-SMART.
2) Memperoleh perspektif baru dari mahasiswa dalam pengembangan strategi peningkatan tata Kelola inovasi.

3. Bagi Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi) :
   1) Memperkuat hubungan kerja sama dengan instansi pemerintahan daerah.
   2) Menyediakan ruang pembelajaran aplikatif bagi mahasiswa dalam mengintegrasikan teori dengan praktik lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan suatu proses yang dilakukam oleh pemerintrah daerah yang meliputi penciptaan, pengembangan, dan penerapan ide-ide baru yang dapat memberikan manfaat untuk pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Inovasi daerah ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inovasi daerah mencakup pengenalan teknologi baru, perbaikan sistem manajemen, pendekatan kebijakan, model pelayanan baru, maupun metode partisipatif yang mrlibatkan masyarakat. Inovasi daerah dibuat un tuk menyelesaikan tantangan lokal seperti kesenjangan sosial, perlambatan ekonomi daerah, keterbatasan anggaran, hingga rendahnya kualitas layanan publik. Inovasi daerah dapat memberikan ruang bagi daerah untuk lebih kreatif, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan daerahnya.

Penerapan inovasi daerah ini juga sejalan dongan konsep governance dan pembangunan berkelanjutan di mana pemerintah daerah juga dapat menjadi fasilitator, kolabolator, dan penggerak kemjuan daerah melalui pendekatan yang terbuka, efisien, dan partisipatif. Berdasarkan Permendagri No. 104 Tahun 2018, jenis inovasi daerah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

   Inovasi ini mencakup perubahan dalam pengelolaan dan penerapan fungsi-fungsi administrasi dan manajerial oleh pemerintah agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan efisiensi internal, juga mempercepat proses pelayanan birokrasi.
2. Inovasi Pelayanan Publik

   Inovasi ini memiliki fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat dari segi akses, kecepatan, kenyamanan, maupun hasil layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tujuan utama dari adanya inovasi ini adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Inovasi Daerah Lainnya yang Sesuai dengan Urusan Pemerintah
   Inovasi daerah ini mencakup inovasi yang belum termasuk ke dalam dua jenis inovasi daerah sebelumnya. Namun, inovasi yang dibuat harus searah dengan tugas dan wewenang pemerintah berdasarkan undang-undang. Inovasi ini mencakup dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, lingkungan hidup, dan sebagainya.

2.2 Teori Inovasi Schumpeter

Teori ini dikemukakan oleh Joseph Alois Schumpeter melalui bukunya yang berjudul The Theory of Economic Development pada tahun 1934. Menurut Schumpeter, kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan entrepreneur. Schumpeter juga berpendapat bahwa inovasi bisa beragam hal,seperti menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk, mengembangkan metode baru dalam berproduksi, membuka pasar baru, serta menemukan sumber daya baru untuk pasokan. Teori inovasi schumpeter dikaitkan dengan adanya kemajuan teknologi yang dapat menghasilkan peluang dan keuntungan, sehingga akan meningkatkan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau perbankan dalam produk-produk baru yang inovatif dan pada akhirnya hal ini akan menarik pihak lain dalam industri untuk melakukan investasi teknologi yang akan mengikis margin keuntungan untuk inovasi (Shanmugam & Nigam, 2020).

Dapat disimpulkan berdasarkan pendapat Shanmugam & Nigam (2020) di atas, ketika perbankan menggunakan fintech pada layanannya maka kinerja keuangan akan meningkat, namun hal tersebut akan menimbulkan persaingan antar bank yang menawarkan fasilitas serupa, sehingga hal ini akan mengikis margin keuntungan inovasi bagi perbankan.

2.3 Tata Kelola Inovasi

Tata kelola inovasi merupakan proses sistematis dalam mengelola sumber daya, pengetahuan, dan aktor-aktor strategis dalam sistem inovasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berbasis inovasi. Menurut Kuhlmann dan Arnold (2001), tata kelola inovasi mencakup mekanisme koordinasi antara pelaku inovasi, termasuk regulasi, dukungan kebijakan, dan fasilitasi interaksi antar pemangku kepentingan. Tata kelola yang efektif harus mencakup pengelolaan sumber daya seperti pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia, serta pengelolaan pengetahuan dari hasil riset dan data yang relevan (Edler & Fagerberg, 2017).

Selain itu, inovasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat—yang dikenal dengan konsep *quadruple helix* (Carayannis & Campbell, 2009). Tata kelola inovasi yang baik ditandai oleh adanya kolaborasi multi-pihak, transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pelaksanaan program, serta keberlanjutan hasil inovasi dalam jangka panjang. Dalam konteks pemerintahan daerah, tata kelola inovasi berperan penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap perubahan (OECD, 2015). Oleh karena itu, sistem yang mampu mendukung tata kelola inovasi secara digital dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

2.4 Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan kerangka kerja yang menekankan pada pentingnya interaksi dan sinergi antara berbagai aktor di tingkat daerah untuk mendorong proses inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. SIDa dibangun atas dasar pemikiran bahwa inovasi tidak terjadi secara linier, melainkan melalui proses interaktif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan penelitian, serta masyarakat (Kemenristek, 2012). Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah sangat penting sebagai fasilitator dan penggerak ekosistem inovasi melalui kebijakan, regulasi, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Pendekatan SIDa sejalan dengan konsep *quadruple helix*, yang memandang bahwa

kolaborasi antara keempat aktor utama—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas—dapat mempercepat pemanfaatan hasil riset dan teknologi untuk pembangunan daerah (Carayannis & Campbell, 2009). Dengan kata lain, SIDa tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan inovasi, tetapi juga memastikan bahwa inovasi tersebut relevan, dapat diadopsi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, implementasi SIDa menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam era ekonomi berbasis pengetahuan.

2.5 Transformasi Digital Dalam Pemerintahan

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan proses strategis dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mentransformasikan cara kerja birokrasi secara menyeluruh, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya mencakup digitalisasi dokumen atau layanan, tetapi juga perubahan model tata kelola, budaya kerja, dan pengambilan keputusan berbasis data (OECD, 2019). Dalam konteks manajemen inovasi di daerah, transformasi digital memungkinkan terjadinya integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program inovatif melalui platform digital yang terpusat dan partisipatif. Digitalisasi proses pemerintahan juga dapat mempercepat penyebaran informasi, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan respons kebijakan publik (Wirtz et al., 2018). Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola inovasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara implementasi sistem BI-SMART dengan peningkatan kualitas tata kelola inovasi di Kabupaten Boyolali. Permasalahan awal yang dihadapi pemerintah daerah mencakup belum optimalnya pelaporan inovasi, rendahnya partisipasi perangkat daerah, serta terbatasnya akses terhadap data inovasi yang

akurat dan terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan pengambilan kebijakan belum sepenuhnya berbasis data (evidence-based policy) dan proses inovasi berjalan tidak sistematis.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

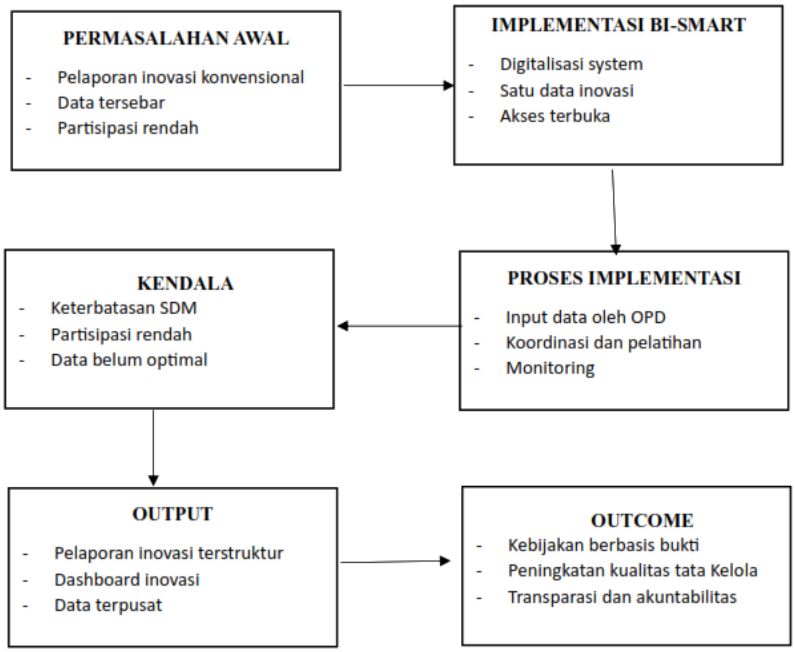

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BAPPERIDA mengembangkan sistem BI-SMART (Boyolali Innovation System Management of Research and Technology) yang berfungsi sebagai platform digital satu data inovasi. Implementasi BI-SMART dilakukan melalui tahapan pelatihan, sosialisasi, penginputan data oleh OPD, dan pemantauan berkala. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi pengguna, serta belum optimalnya pemanfaatan data untuk penyusunan kebijakan.

Melalui proses implementasi yang berjalan, BI-SMART menghasilkan output berupa sistem pelaporan inovasi yang lebih terstruktur, data inovasi yang terdokumentasi secara real-time, serta peningkatan akuntabilitas pelaporan dari perangkat daerah. Output ini diharapkan dapat mendorong tercapainya outcome berupa pengambilan kebijakan yang berbasis data, peningkatan kualitas tata kelola

inovasi, serta terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif.

Hubungan antara permasalahan, solusi yang ditawarkan, proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hingga capaian hasil, digambarkan secara sistematis dalam bentuk bagan kerangka berpikir diatas.

BAB III

METODE UNNES PRIGEL

3.1 Lokasi UNNES PRIGEL

Lokasi UNNES PRIGEL dilaksanakan di:

Nama Mitra	:	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali
Alamat Mitra	:	Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jalan DR. Soepomo, Kemiri, Wonosari, Kemiri, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482
No. Telp	:	(0276) 321941
Fax	:	(0276) 325203
Email	:	bapperida@boyolali.go.id
Web	:	https://bapperida.boyolali.go.id/

3.2 Desain/ Rancangan UNNES PRIGEL

Penelitian dalam laporan magang ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan (field study). Rancangan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi sistem BI-SMART serta bagaimana sistem tersebut berperan dalam mendukung pengelolaan inovasi di Kabupaten Boyolali. Rancangan ini juga memungkinkan penulis untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan teknis, observasi, serta interaksi dengan pegawai Bapperida, guna memahami dinamika pelaksanaan sistem dan tantangan yang dihadapi dalam prosesnya.

Tabel 3.1 Pembagian Tugas Magang Di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali

NO	TANGGAL	BIDANG	TUGAS
1.	3 s/d 7 Februari 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi. 2. Pembagian bidang selama kegiatan magang 3. Memperkenalkan diri kepada Pegawai LITBANG BAPPERIDA BOYOLALI. 4. Diberi petunjuk untuk mengoperasikan BI-SMART 5. Membantu membuatkan laporan monitoring dan evaluasi inovasi-inovasi di Kabupaten Boyolali tahun 2021-2024 6. Menyelesaikan sebanyak 28 laporan monitoring dan evaluasi 7. Dan memasukkan hasil laporan monitoring dan evaluasi tersebut ke dalam G-Drive
2.	10 s/d 14 Februari 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu membuat Power Point Animasi untuk pemaparan progam kerja (KEBIJAKAN PEMKAB BOYOLALI DALAM PEMBERDAYAAN DAN

			PENGEMBANGAN UMKM) 3. Melanjutkan membuat Power Point Animasi untuk pemaparan progam kerja (KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK) 4. Melanjutkan membuat Power Point Animasi untuk pemaparan progam kerja (EVALUASI KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT) 5. Membatu membuatkan video ppt materi inovasi 6. Membantu mengerjakan Dokumen Kontrak 2021
3.	17 s/d 21 Februari 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu mengerjakan dan meneliti Dokumen Kontrak 2022 serta memasukkan ke G-Form 3. Membantu mengerjakan dan meneliti dokumen kontrak 2023 serta memasukkan ke G-Form 4. Membantu mengerjakan dan meneliti dokumen kontrak 2024 serta memasukkan ke G-Form 5. Membantu menganalisis penawaran pekerjaan pengadaan cetak penggandaan

			kantor Bapperida Tahun Anggaran 2025 sri Wijaya 6. Mengikuti Kegiatan jumat bersih
4.	24 s/d 28 Februari 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Menganalisis dan meneliti laporan Penawaran Cetak (Sri Wijaya) dan meneliti laporan Penawaran Atk (Sri Wijaya) 3. Menganalisis dan meneliti Laporan akhir sumber pangan 1 4. Menganalisis dan meneliti Laporan Optimalisasi pengelolaan APBD untuk mewujudkan Kabupaten Boyolali Mandiri dan berdaya saing 5. Mulai mengerjakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), mendapat 10 DPA
5.	3 s/d 7 Maret 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 93 DPA
6.	10 s/d 14 Maret 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 138 DPA 3. Mengatarkan Dokumen SK ke SETDA Kab. Boyolali
7.	17s/d 21 Maret 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Mengantarkan SK ke

			Sekretariat daerah boyolali 3. Membantu menyiapkan atk 4. Meneliti dokumen penggandaan dari Sri Wijaya 5. Meneliti dokumen penggandaan dari Sri Wijaya
8.	24 s/d 27 Maret 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Memintakan stampel dokumen surat serah terima buku ke bidang kesetariatan 3. Membuat video cinematography bulan ramadan 4. diperintahkan oleh Kepala Bidang untuk mengantarkan paket di Smart Center Diskominfo Boyolali
9.	8 s/d 11 April 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Masuk pertama setelah libur lebaran 3. Melaksanakan Halal Bihalal 4. Membuat template desain PPT 1, desain PPT 2, dan desain PPT 3
10.	14 s/d 17 April 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Saya diperintahkan oleh Kepala Bidang untuk mengantarkan paket ke Dapoer Ibu Boyolali 3. Saya diperintahkan oleh Kepala Bidang untuk mengambil paket di Smart Center Diskominfo Boyolali 4. Memberikan informasi kepada

			peserta lomba krenova terkait votting inovasi terfavorit melalui whatsapp 5. Mengecek form penilaian krenova dengan aplikasi bismart untuk melihat ada kesalahan input data atau tidak
11.	21 s/d 25 April 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengcross check Kaos untuk acara krenova 2025 3. Mengcross check dan membuat form inovasi inovasi peserta lomba Krenova 2025 4. Saya diperintahkan untuk membantu menyiapkan dan mengecek data Id Card Lomba Krenova Bapperida Boyolali 2025 5. Saya diperintahkan untuk membantu menyiapkan sterofoam untuk sertifikat Lomba Krenova Bapperida Boyolali 2025 6. Menyiapkan sertifikat untuk lomba Krenova dan menyiapkan Id Card untuk peserta lomba Krenova Bapperida Boyolali 2025
12.	28 s/d 2 Mei 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Merekap data data peserta krenova 2025 3. Mengikuti zoom bintek

			krenova 2025 4. Posting inovasi peserta krenova di Instagram Bapperida_boyolali sejumlah 53 postingan inovasi 5. Mengikuti zoom tehnical meeting lomba krenova 2025
13.	5 s/d 9 Mei 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti apel pagi 2. Membantu menyiapkan piala krenova awards untuk lomba krenova 2024 3. Ikut serta menjadi panitia lomba krenova 2025 tanggal 6-7 mei yang diagendakan diperpustakaan umum kabupaten Boyolali. Jobdes bagian registrasi peserta lomba krenova 2025 4. Membantu membersihkan kesalahan penulisan di piala awards krenova 5. Membantu registrasi rapat sosialisasi penyusunan dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten boyolali
14.	14 s/d 16 Mei 2025	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Merekap Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Perintah, Surat Keputusan, dan lain lain
15.	19 s/d 23 Mei	Riset dan Inovasi	1. Mengikuti Apel Pagi

	2025		2. Membantu menscan surat masuk, surat keluar, surat perintah serta berita acara. 3. Menginput laporan pendahuluan dan akhir serta Menginput manual book 4. Membantu membagikan kaos krenova ke semua bidang (sektretaris, bidang 1, bidang 2 dan bidang 3). Serta membantu memintakan tanda tangan untuk kaos krenova. 5. Membantu dalam pembuatan video KIPP dengan menjadi pengisi suara

Sumber : Penulis, 2025

3.3 Penentuan objek UNNES PRIGEL

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali khusunya Bidang Riset dan Inovasi yang memiliki tugas dan wewenang utama melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi,dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Objek utama dalam kegiatan magang ini adalah sistem ***BI-SMART (Boyolali Innovation System Management of Research and Technology)***, yakni platform digital yang dikembangkan oleh Bapperida Kabupaten Boyolali sebagai media untuk pendataan, pemantauan, dan pelaporan inovasi daerah secara terintegrasi. Selain itu, kegiatan magang juga menitikberatkan pada pengamatan terhadap proses koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), strategi pengumpulan data inovasi, dan efektivitas sistem dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti.

3.4 Metode pengumpulan data UNNES PRIGEL

Metode pengumpulan data dalam penyusunan laporan magang adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan informan. Dalam proses wawancara, terdapat suatu interaksi antara penulis dengan informan. Wawancara dilaksanakan dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penulis mendapatkan informasi dan data secara langsumg dengan melakukan wawancara dengan pegawai Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Boyolali.

2. Observasi

   Observasi merupakan teknik pengumpulan data langsung dari lapangan. Menurut (Kristanto, 2018), observasi merupakan proses yang diawali dengan pengamatan kemudian pencatatan sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena dalam situasi yang ada. Observasi dalam laporan ini dilakukan dengan men gamati secara langsung kegiatan tata kelola yang dilakukan oleh pegawai Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Boyolali.

3. Dokumentasi

   Data dan informasi juga dapat diperoleh dari fakta yang berbentuk surat, cacatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang telah terlaksana sebelumya. Dokumentasi yang digunakan dalam penyusunan laporan magang ini adalah data yang tersimpan dalam Aplikasi Satu Data Kabupaten Boyolali (Bi-Smart)

4. Studi Pustaka

   Metode pengumpulan data dengan cara mencari bahan-bahan acuan

tambahan sebagai pemantapan penyusunan laporan. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literartur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek

3.5 Instrumen UNNES PRIGEL

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari pedoman observasi, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Pedoman observasi digunakan untuk mencatat aktivitas dan proses implementasi sistem secara langsung. Pedoman wawancara disusun untuk membantu penulis dalam menggali informasi yang lebih dalam terkait persepsi, pengalaman, serta kendala yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam mengelola inovasi. Selain itu, dokumentasi visual dan administratif seperti foto kegiatan, laporan cetak, serta tangkapan layar sistem juga digunakan sebagai instrumen pelengkap. Selanjutnya alat yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut yaitu :

1. Komputer atau Laptop : alat ini berguna untuk mencari data pada laman resmi pihak terkait dan menyimpannya untuk dimasukkan ke dalam laporan magang ini.
2. HP: alat ini khususnya pada menu kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan selama periode magang.
3. Buku dan bolpoin : alat yang digunakan untuk mencatat jawaban penting atas wawancara dan konsultasi kepada kepala bidang dan staff Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Boyolali.

3.6 Teknik analisis data UNNES PRIGEL

Dalam peneltian magang ini teknis analisis data yang digunakan adalah berdasarkan proses analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (Rijali, 2018) yaitu :

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data merupakan bagian utama dalam penelitian sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam, karena dengan melakukan

pengumpulan data kita mendapatkan bahan utama dan bahan pendukung untuk melakukan analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Bidang dan Staff Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Boyolali dan studi literiratur dari laman resmi pihak terkait.

2. Reduksi Data

   Reduksi data yaitu menyaring dan menyeleksi informasi penting dari hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi dikategorikan dan diberi kode berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan langsung dengan fokus kajian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan didukung oleh kutipan langsung maupun dokumentasi visual untuk memperkuat temuan.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan yaitu merumuskan hasil analisis secara sistematis guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan tantangan implementasi BI-SMART, serta menyusun rekomendasi strategis yang dapat mendukung peningkatan tata kelola inovasi di Kabupaten Boyolali.

BAB IV

HASIL UNNES PRIGEL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Magang

4.1.1 Profil Bapperida Kabupaten Boyolali

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Bapperida Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Terbentuknya Bapperida Kabupaten Boyolali merupakan hasil dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 sekaligus mencabut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 132 Tahun 2021.

Pada tahun 2018 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali sempat mengalami perubahan nama dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) dan di awal tahun 2024 berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali. Terdapat tugas pokok serta fungsi penelitian dan pengembangan di Bapperida Kabupaten Boyolali yang sebelumnya tidak ada di Bapperida Kabupaten Boyolali. Sehingga uraian tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024.

4.1.2 Visi dan Misi Bapperida Kabupaten Boyolali

Dalam pelaksanaan tugas pokok suatu lembaga pemerintahan dilakukan upaya untuk merealisasikan dengan menyusun Visi dan Misi, termasuk Bapperida Kabupaten Boyolali. Visi dan Misi Bapperida Kabupaten Boyolali merujuk pada Visi dan Misi Kabuapaten Boyolali, yaitu sebagai berikut:

Visi:

"Terwujudnya Perubahan Boyolali yang Maju, Nyaman, Dihuni, Berdaya Saing, dan Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Sehat, Cerdas dan Berjiwa Pancasila.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah.
3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan.
4. Mewujudkan Pemerintahan Demokratis, dengan Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif.
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Bapperida Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali, Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bapperida melaksanakan fungsi yang disebutkan pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;
2. Penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan daerah dalam bentuk dokumen, antara lain RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
4. Penyelenggaraan riset dan inovasi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Boyolali

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Boyolali

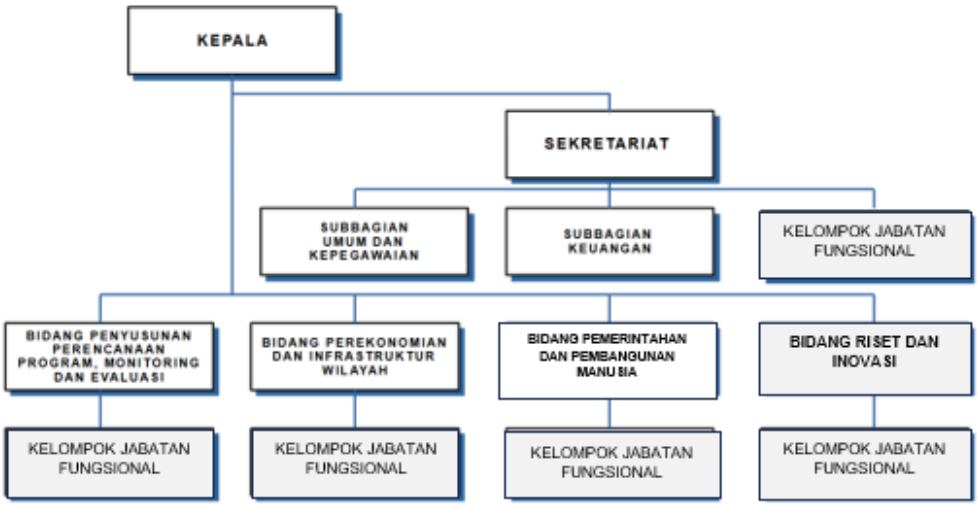

Keterangan:

a. Kepala Badan

Bapperida Boyolali dipimpin oleh Kepala Bapperida yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida. Kepala Bapperida Kabupaten Boyolali saat ini dijabat oleh Bapak M. Syawalludin, AP, M.Si.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, pelaporan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian ASN di lingkungan Bapperida. Sekretaris Bapperida Kabupaten Boyolali dijabat oleh Bapak Taufif Musalim,S.H.M.Hum.

c. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi

Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, monitoring, dan evaluasi, pendataan dan pelaporan kinerja pembangunan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi perencanaan kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi dipimpin oleh Bapak Mardani, S. Sos, M. Si.

d. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, meliputi urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal badan usaha milik Daerah, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, penanggulangan bencana, dan kecamatan. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah Bapperida Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Bapak Kunawi, S.T.

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,

sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, inspektorat, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, kebudayaan, pemuda olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Bapak Bayu Sahid Nuroho, SP.

f. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah. Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Bapak Achmad Nasution, SE, M.Si.

4.2 Aktivitas Magang di Bapperida Kabupaten Boyolali

Selama menjalani aktivitas magang di, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali saya terlibat dalam Pengamatan dan penggunaan Aplikasi BI-SMART. Kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang Aplikasi BI-SMART. Setiap informasi dan data yang dimasukkan harus diverifikasi dengan teliti untuk memastikan kualitas dan keabsahannya.

Berdasarkan pengalaman magang tersebut, saya memutuskan untuk mengambil judul laporan magang " Implementasi BI-SMART dalam Tata Kelola Inovasi di Kabupaten Boyolali". Judul tersebut relevan karena mencakup *lokasi, objek studi (BI-SMART), dan fokus kebijakan (tata kelola inovasi)*. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana sistem BI-SMART diimplementasikan oleh Pemerintah

Kabupaten Boyolali dalam mendorong inovasi daerah secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan

Melalui laporan ini, Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola inovasi menjadi aspek krusial dalam mendorong efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. BI-SMART sebagai salah satu platform digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, berperan dalam memfasilitasi perencanaan, pelaporan, hingga evaluasi program inovasi daerah. Dengan adanya sistem ini, proses identifikasi, dokumentasi, dan pengukuran kinerja inovasi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan transparan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi BI-SMART tidak hanya penting untuk melihat sejauh mana sistem ini berhasil dioperasionalkan, tetapi juga untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif.

Dengan demikian, kajian terhadap implementasi BI-SMART diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem dalam mendukung penguatan inovasi daerah serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan inovasi di masa mendatang.

4.3 Implementasi serta Kendala system BI-SMART dalam Tata Kelola Inovasi di Kabupaten Boyolali

BI-SMART adalah singkatan dari Boyolali Innovation System Management of Research and Technology. Ini adalah sistem manajemen penelitian dan teknologi inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Platform ini berfungsi sebagai portal satu data inovasi dan riset untuk memfasilitasi pengelolaan riset, inovasi, dan data di wilayah Kabupaten Boyolali. Aplikasi Bi-Smart ditujukan untuk merumuskan strategi dan arah kebijkan terkait inovasi yang tersusun dan terkelolanya aplikasi dalam memberikan layanan data terkait nilai IID pemerintahan khususnya di Bapperida Kabupaten Boyolali kepada para penggunanya serta mendapatkan antusias dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4.2 Tampilan Awal BI-SMART

SIMBo (Simpul Inovasi Maju Boyolali) menggambarkan BI-SMART sebagai platform sentral yang menghubungkan berbagai potensi inovasi di Boyolali untuk bersama-sama mendorong kemajuan daerah. Nama ini mengandung makna kolaborasi, fokus pada inovasi, dan harapan akan dampak positif bagi perkembangan Kabupaten Boyolali di masa depan. Maskot SIMBo diharapkan dapat menjadi representasi visual yang mudah diingat dan membangkitkan semangat inovasi di seluruh lapisan masyarakat Boyolali.

Inovasi BI-SMART merepresentasikan transformasi fundamental dalam tata kelola inovasi di Kabupaten Boyolali melalui implementasi sistem digital yang terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada data. Platform ini tidak sekadar berfungsi sebagai pusat dokumentasi inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah, masyarakat, serta kalangan akademisi, melainkan juga berperan krusial sebagai instrumen analitis yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Gambar 4.3 Berita di BI-SMART

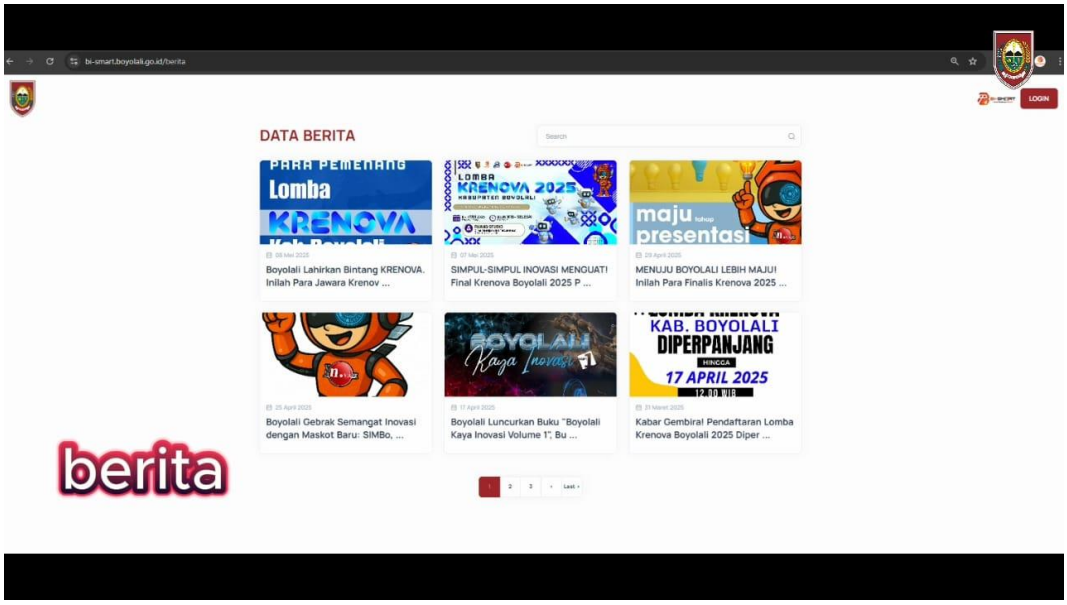

Inovasi BI-SMART merupakan sistem digital terintegrasi berbasis web yang berfungsi sebagai penghubung data riset, inovasi daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sebuah platform terpadu. Sistem ini memfasilitasi proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan kinerja inovasi secara waktu nyata (*real-time*) dan transparan. Cara Kerja Inovasi:

1. Platform ini memfasilitasi registrasi akun, unggah proposal inovasi/Krenova, dan pengisian indikator bagi Perangkat Daerah, ASN, BUMD, pelajar serta masyarakat. Inovasi yang dilaporkan diikutsertakan dalam IGA dan dievaluasi melalui rapor inovasi untuk seleksi Pekan Inovasi Boyolali (PINBOY).
2. Fasilitasi pendampingan inovasi dilaksanakan oleh tim Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA guna memberikan arahan terkait inovasi yang telah dilaporkan.
3. Pengguna juga dapat menyampaikan aspirasi/keluhan melalui kanal resmi WhatsApp 0859-2657-6489, WA Group "Inovasi Membangun Boyolali", pesan langsung (DM) Instagram dengan akun @bapperida_boyolali atau melalui email litbang.bp3d@gmail.com.

Tahapan Implementasi, yaitu:

1. Pembentukan tim efektif melalui SK Bupati Boyolali Tahun 2023 dan 2024.
2. Melakukan FGD Penyusunan Rancangan Sistem.
3. Menyusun dan melakukan standarisasi prosedur penggunaan aplikasi BI-SMART.
4. Sosialisasi BI-SMART pada seluruh Perangkat Daerah, UPT dan Masyarakat.
5. Menyusun SE Sekretaris Daerah tentang implementasi data riset dan inovasi daerah dalam aplikasi BI-SMART.
6. Pengembangan fitur Aplikasi BI-SMART.
7. Pelindungan Kekayaan Intelektual Aplikasi BI-SMART.
8. Monev untuk memastikan efektivitas dan pengembangan layanan

Sebagai gambaran, Platfrom Satu Data Inovasi Boyolali dapat diakses melalui alamat link https://bi-smart.boyolali.go.id berisi dari 8 menu yang dapat dipilih.

Gambar 4.4 Ragam Fitur Komprehensif BI-SMART

Dengan ragam fitur komprehensif yang mencakup katalog inovasi, jurnal riset, sistem penilaian Karya Kreatif dan Inovatif (Krenova), Pekan Inovasi Boyolali, fasilitasi riset/kajian, penelitian pelajar/mahasiswa,

program Duta Inovasi, hingga forum diskusi Bi-Nite, BI-SMART secara proaktif mendorong kolaborasi interdisipliner, transparansi informasi, dan penguatan budaya inovatif di seluruh spektrum pemerintahan dan masyarakat.

Sebelum adanya BI-SMART, mekanisme pelaporan inovasi cenderung konvensional, mengandalkan formulir daring (*google form*) sederhana dan pengumpulan proposal Krenova dalam format fisik (*hard copy*). Kini, keseluruhan alur kerja telah bertransformasi secara digital, menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi, strukturisasi, dan kemudahan akses informasi. Implementasi inovasi ini diperkuat oleh Surat Edaran Bupati Nomor 2368 Tahun 2023 tentang Pembudayaan Inovasi dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 04553 Tahun 2024 tentang Implementasi Platform Satu Data Inovasi Melalui Aplikasi *Boyolali Innovation System Management of Research and Technology* (BI-SMART).

Kendati BI-SMART mampu menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terstruktur, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala tersebut guna memastikan keberlanjutan dan penyempurnaan sistem di masa mendatang.

Meskipun BI-SMART telah membawa terobosan dalam pengelolaan inovasi di Kabupaten Boyolali, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan literasi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi digital, sehingga proses input data, pelaporan, maupun pemanfaatan fitur-fitur analitis BI-SMART belum berjalan secara optimal. Hal ini mengakibatkan masih adanya ketergantungan pada tim teknis atau admin pusat untuk melakukan pembaruan dan entri data inovasi.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku inovasi lokal dalam penggunaan platform ini juga masih tergolong rendah. Meskipun BI-SMART telah didesain untuk terbuka bagi publik, kenyataannya belum semua kalangan, seperti pelajar, akademisi, pelaku usaha, maupun komunitas inovator, memanfaatkan platform ini secara aktif. Kurangnya sosialisasi berkelanjutan, terbatasnya insentif, serta belum menyeluruhnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat langsung dari BI-SMART menjadi faktor utama yang menghambat pelibatan publik secara lebih luas.

Di sisi teknis, infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa wilayah di Boyolali masih menghadapi keterbatasan akses internet cepat yang stabil, sehingga menyulitkan perangkat daerah maupun masyarakat untuk mengakses dan menggunakan BI-SMART secara maksimal. Selain itu, sistem masih rentan terhadap gangguan teknis seperti error saat unggah dokumen, waktu pemuatan halaman yang lambat, atau kebutuhan pembaruan sistem yang belum rutin dilakukan karena keterbatasan anggaran dan SDM teknis.

Integrasi data lintas perangkat daerah juga belum berjalan sepenuhnya efektif. Walaupun BI-SMART mengusung konsep satu data inovasi, kenyataannya belum semua perangkat daerah memiliki data inovasi yang terdokumentasi dengan rapi dan siap untuk diunggah. Banyak data inovasi yang masih tersimpan secara manual atau tersebar dalam berbagai format, sehingga membutuhkan proses konversi dan verifikasi tambahan sebelum dapat diintegrasikan ke dalam sistem. Hal ini tentu memperlambat proses pembaruan data secara menyeluruh.

Tak hanya itu, tantangan juga muncul dari sisi budaya kerja. Budaya inovatif belum sepenuhnya tertanam dalam keseharian birokrasi maupun masyarakat. Inovasi masih dianggap sebagai kegiatan tambahan, bukan bagian dari tanggung jawab utama dalam peningkatan kinerja daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya inisiatif dan motivasi untuk melaporkan, mengembangkan, atau menduplikasi inovasi secara aktif. Upaya untuk

membangun ekosistem inovasi yang sehat perlu dilengkapi dengan pendekatan perubahan budaya organisasi dan masyarakat.

Terakhir, mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penggunaan dan efektivitas BI-SMART masih belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Minimnya evaluasi membuat pengelola kesulitan untuk mengetahui kelemahan sistem secara real-time dan mengembangkan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Padahal, monev yang konsisten sangat penting untuk menjamin keberlanjutan, peningkatan kualitas, dan relevansi platform dengan kebutuhan riil pengguna.

Dengan mengidentifikasi dan memahami berbagai kendala tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat merumuskan strategi penguatan sistem BI-SMART secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, guna mendukung terciptanya tata kelola inovasi yang inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

4.4 Efektivitas BI-SMART dalam Mendorong Partisipasi Perangkat Daerah dan Pelaporan Inovasi Secara Terintegrasi

Implementasi BI-SMART di Kabupaten Boyolali menunjukkan upaya konkret pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola inovasi yang lebih partisipatif, terbuka, dan berbasis data. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah meningkatnya efektivitas partisipasi perangkat daerah melalui pelaporan inovasi yang lebih sistematis dan terintegrasi. BI-SMART telah menyediakan platform digital yang tidak hanya memfasilitasi pencatatan inovasi secara real-time, tetapi juga menjadi alat penghubung antara pemerintah daerah dan ekosistem inovasi secara menyeluruh.

Efektivitas sistem ini tercermin dari alur kerja yang kini lebih terstruktur dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yang bersifat manual dan tersebar. Melalui BI-SMART, setiap perangkat daerah diwajibkan membuat akun dan melaporkan inovasi masing-masing, baik yang bersifat administratif, pelayanan publik, maupun kebijakan strategis. Proses pelaporan inovasi kini dapat dilakukan secara daring melalui

pengisian indikator, unggah dokumen, serta input capaian kinerja yang dapat dipantau secara langsung oleh tim evaluasi dari BAPPERIDA. Data Perangkat Daerah sebagai Pengguna Aplikasi BI-SMART sejumlah 428 akun.

Lebih dari itu, sistem BI-SMART juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena data yang telah diinput tidak hanya tersimpan dalam satu database, tetapi juga dapat diakses untuk keperluan monitoring dan evaluasi berkala. Hal ini membuat perangkat daerah lebih terdorong untuk secara aktif melaporkan progres dan hasil inovasinya, karena proses penilaian dan penghargaan (seperti Pekan Inovasi Boyolali dan Krenova) kini terintegrasi langsung dalam sistem. Setiap inovasi yang masuk pun mendapatkan nomor registrasi dan status verifikasi yang dapat ditelusuri, menciptakan ekosistem yang tertib administrasi dan minim duplikasi data.Selain itu, BI-SMART juga memberikan ruang kolaboratif antar-perangkat daerah dan lintas sektor, melalui fitur-fitur seperti forum diskusi, pendampingan inovasi oleh BAPPERIDA, serta keterlibatan langsung masyarakat dan akademisi. Ini menandakan bahwa platform ini tidak hanya menjadi sarana dokumentasi pasif, tetapi juga sebagai media interaksi dan inkubasi gagasan. Partisipasi perangkat daerah pun diperkuat dengan adanya surat edaran Bupati dan Sekretaris Daerah yang mewajibkan pelaporan inovasi melalui BI-SMART, serta jadwal evaluasi rutin yang menjadi bagian dari penilaian kinerja OPD.

Meski demikian, efektivitas ini belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah. Beberapa OPD masih memerlukan dukungan teknis dan pendampingan untuk memahami standar pelaporan yang sesuai. Namun secara umum, BI-SMART telah memberikan dasar kuat bagi transformasi digital dalam tata kelola inovasi, dan berkontribusi nyata dalam membentuk budaya pelaporan yang disiplin, kolaboratif, dan berbasis data. Dengan demikian, BI-SMART terbukti efektif sebagai alat penggerak partisipasi aktif dari perangkat daerah sekaligus sebagai media integrasi data inovasi yang akurat dan terstruktur. Sistem ini menjadi pilar penting dalam pencapaian target Indeks Inovasi Daerah serta memperkuat posisi

Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan dan berorientasi pada pelayanan publik yang inovatif.

4.5 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BI-SMART dalam mendukung tata Kelola inovasi berbasis bukti (Evidence-Based Policy)

Meskipun BI-SMART telah menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas tata kelola inovasi di Kabupaten Boyolali, pemanfaatannya masih dapat terus dioptimalkan agar lebih efektif mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Optimalisasi ini penting untuk memastikan bahwa inovasi yang berkembang tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga mampu diolah menjadi basis data strategis dalam perumusan kebijakan daerah.

Salah satu upaya utama adalah peningkatan kapasitas SDM**,** terutama di lingkungan perangkat daerah. Banyak pengguna aplikasi yang masih terbatas pada level operator teknis, padahal pemanfaatan BI-SMART seharusnya mampu menjangkau level pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pelatihan reguler tidak hanya difokuskan pada penggunaan teknis, tetapi juga pada analisis data inovasi, interpretasi indikator, serta pemanfaatannya dalam perencanaan program.

Selain itu, penguatan integrasi BI-SMART dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah menjadi langkah penting berikutnya. Data inovasi yang masuk melalui platform ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun RKPD, Renstra, dan program prioritas daerah. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan indikator inovasi yang relevan dengan indikator kinerja pemerintah daerah serta membangun konektivitas antarplatform seperti SIPD dan e-Planning.

Strategi diseminasi dan promosi platform BI-SMART juga perlu diperluas, tidak hanya kepada ASN, tetapi juga kepada akademisi, pelajar, masyarakat, dan pelaku usaha. Perluasan kanal komunikasi seperti media sosial, webinar inovasi, dan kompetisi tematik akan meningkatkan literasi

publik terhadap pentingnya inovasi sebagai bagian dari pembangunan. Hal ini sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan ide dan praktik inovatif.

Selanjutnya, penguatan fitur analitik dalam sistem BI-SMART menjadi langkah strategis. Dengan adanya fitur dashboard yang menampilkan tren, klaster inovasi, hingga dampak sosial dan ekonomi, pengambil kebijakan akan lebih mudah memahami peta inovasi daerah. Analitik ini dapat digunakan sebagai dasar justifikasi kebijakan, evaluasi program, serta pengembangan riset kolaboratif lintas sektor.

Terakhir, diperlukan mekanisme penghargaan dan insentif yang mendorong perangkat daerah maupun individu untuk aktif berinovasi dan melaporkan inovasinya melalui BI-SMART. Penguatan sistem reward seperti Krenova, Pekan Inovasi Boyolali, hingga Duta Inovasi perlu dikaitkan langsung dengan kinerja laporan inovasi di platform ini.

Dengan implementasi berbagai strategi di atas, BI-SMART tidak hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data dan inovasi. Optimalisasi ini juga akan memperkuat posisi Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif.

Implementasi aplikasi BI-SMART memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai berbagai program inovasi daerah yang sedang atau telah dijalankan, termasuk capaian kinerja dan indikator evaluasi yang tersedia secara terbuka. Hal ini mendorong partisipasi publik dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga tercipta hubungan yang lebih responsif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, BI-SMART juga membantu mempercepat proses pelaporan dan dokumentasi inovasi, sehingga masyarakat secara tidak langsung memperoleh layanan yang lebih cepat, akurat, dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Di sisi lain, BI-SMART turut berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Dengan tersedianya data yang terintegrasi dan terstruktur, pemerintah daerah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan permasalahan riil di lapangan. Misalnya, program inovasi yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dan capaian sebelumnya. Dampak jangka panjangnya, masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal.

Dengan demikian, BI-SMART tidak hanya berfungsi sebagai sistem pelaporan inovasi daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemerintahan yang berbasis data, transparan, dan partisipatif. Ke depan, optimalisasi penggunaan BI-SMART diharapkan mampu memperkuat peran inovasi dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Boyolali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem BI-SMART telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola inovasi daerah. BI-SMART sebagai platform digital satu data inovasi berfungsi tidak hanya sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan dan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Platform ini telah mendorong terjadinya transformasi dalam mekanisme pelaporan inovasi yang sebelumnya manual menjadi terintegrasi dan real-time. Hal ini meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi dari berbagai pihak, khususnya perangkat daerah dan masyarakat. Ragam fitur yang ditawarkan, seperti unggah proposal Krenova, pendampingan inovasi, serta forum interaktif Bi-Nite, turut menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung budaya inovatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Namun demikian, pelaksanaan BI-SMART masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital ASN, partisipasi publik yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, serta belum meratanya integrasi data antar perangkat daerah. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi platform ini masih perlu ditingkatkan agar pengembangan sistem bisa lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Secara keseluruhan, BI-SMART merupakan inovasi yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah berbasis inovasi. Dengan perbaikan dan penguatan dari berbagai aspek, platform ini memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional dalam tata kelola inovasi daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan paparan yang telah penulis jelaskan di atas dan dengan berakhirnya magang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali, penulis ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
   Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi ASN dan operator perangkat daerah agar mampu menggunakan BI-SMART secara optimal, tidak hanya untuk pelaporan, tetapi juga dalam menganalisis dan menggunakan data inovasi untuk pengambilan keputusan.
2. Penguatan Integrasi Sistem dan Regulasi
   Perlu adanya integrasi lebih lanjut antara BI-SMART dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, seperti SIPD dan e-Planning, agar data inovasi benar-benar digunakan dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan.
3. Strategi Peningkatan Partisipasi Publik dan Sosialisasi
   Perluasan jangkauan sosialisasi melalui media sosial, webinar, atau kegiatan inovatif lainnya akan meningkatkan partisipasi dari masyarakat, pelajar, hingga pelaku usaha. Selain itu, penyediaan insentif akan menjadi pemicu bagi munculnya lebih banyak inovasi dari berbagai lapisan masyarakat.
4. Pemutakhiran dan Pengembangan Fitur BI-SMART
   Diperlukan pembaruan sistem secara berkala, termasuk penambahan fitur analitik, visualisasi data, dan dasbor yang informatif agar pengguna, khususnya pimpinan OPD, dapat memahami tren dan capaian inovasi secara cepat dan akurat.

5. Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan rutin dan terstruktur guna menilai efektivitas implementasi BI-SMART, mengidentifikasi hambatan teknis maupun strategis, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan BI-SMART sebagai platform strategis dalam mewujudkan tata kelola inovasi yang berbasis bukti, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). "Mode 3" and "Quadruple Helix": Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3–4), 201–234. https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-government*. Oxford University Press.

Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: What, why, and how. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 2–23. https://doi.org/10.1093/oxrep/grx001

Kabupaten Boyolali. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah

Kabupaten Boyolali. 2022. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah

Kabupaten Boyolali. 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali. 2024. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Riset dan Teknologi. (2012). Pedoman Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Jakarta: Kemenristek.

Kristanto, V. H. (2018). Metodologi penelitian pedoman penulisan karya tulis ilmiah (KTI). Deepublish.

Kuhlmann, S., & Arnold, E. (2001). RCN in the Norwegian Research and

Innovation System. Background Report No. 12 in the Evaluation of the Research Council of Norway.

OECD. (2015). The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264239814-en

OECD. (2019). Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the Public Sector. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7591a313-en

Pemerintah Kabupaten Boyolali. (n.d.). Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali. Diakses pada 2 Maret 2025, dari https://bapperida.boyolali.go.id/

Rijali, A. (2018). Nalisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33, 83-94.

Rohman, A. N., & Bakri, S. (2022). IMPLEMENTASI NILAI RELIGIUSITAS DALAM ADAT RACAN A (STUDI KASUS DI UKK RACANA RADEN MAS SAID–NYI AGENG SERANG UIN RADENMAS.eprints.iainsurakarta.ac.id.http://eprints.iainsurakarta.ac.id/1095/1/Arief%20Nur%20Rohman%20_171121014.docx.pd

Rohman, F., & Bakri, M. (2022). Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Era Digital: Strategi, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 112–127.

Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.

Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Harvard University Press.

Shanmugam, K. R., & Nigam, R. (2020). Impact of technology on the financial performance of Indian commercial banks: a clustering based approach. Innovation and Development, 10 (3), 433–449.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2018). Digital transformation of public administration: A systematic literature review. Public Management Review,21(1), 186–208. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.139305

Lampiran

1. Lampiran Data Perangkat Daerah sebagai Pengguna Aplikasi BI-SMART

NO	Nama	nip
1	Admin BI SMART	bismart
2	ADMIN INSPEKTORAT DAERAH	admin_inspektorat
3	ADMIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	admin_disdikbud
4	ADMIN DINAS KESEHATAN	admin_dinkes
5	ADMIN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	admin_dpupr
6	ADMIN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	admin_dpkp
7	ADMIN DINAS SOSIAL	admin_dinsos
8	ADMIN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMB	admin_dp2kbp3a
9	ADMIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	admin_dlh
10	ADMIN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	admin_dispendukcapil
11	ADMIN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	admin_dispermades
12	ADMIN DINAS PERHUBUNGAN	admin_dishub
13	ADMIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	admin_diskominfo
14	ADMIN DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	admin_diskopnaker
15	ADMIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN	admin_dpmptsp
16	ADMIN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	admin_disporapar
17	ADMIN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	admin_dinarpus
18	ADMIN DINAS PERTANIAN	admin_dispertan
19	ADMIN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	admin_disnakkan
20	ADMIN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	admin_disdagperin
21	ADMIN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	admin_satpolpp
22	ADMIN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAER	admin_bapperida
23	ADMIN BADAN KEUANGAN DAERAH	admin_bkd
24	ADMIN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MA	admin_bkpsdm
25	ADMIN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	admin_bakesbangpol

26	ADMIN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	admin_bpbd
27	ADMIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	admin_rsud_pandan_arang
28	ADMIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS-WIRIS	admin_rsud_waras_wiris
29	ADMIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	admin_rsud_simo
30	ADMIN KECAMATAN CEPOGO	admin_kec_cepoho
31	ADMIN KECAMATAN SELO	admin_kec_selo
32	ADMIN KECAMATAN MUSUK	admin_kec_musuk
33	ADMIN KECAMATAN AMPEL	admin_kec_ampel
34	ADMIN KECAMATAN BOYOLALI	admin_kec_boyolali
35	ADMIN KECAMATAN MOJOSONGO	admin_kec_mojosongo
36	ADMIN KECAMATAN TERAS	admin_kec_teras
37	ADMIN KECAMATAN SAWIT	admin_kec_sawit
38	ADMIN KECAMATAN BANYUDONO	admin_kec_banyudono
39	ADMIN KECAMATAN SAMBI	admin_kec_sambi
40	ADMIN KECAMATAN SIMO	admin_kec_simo
41	ADMIN KECAMATAN NGEMPLAK	admin_kec_ngemplak
42	ADMIN KECAMATAN NOGOSARI	admin_kec_nogosari
43	ADMIN KECAMATAN ANDONG	admin_kec_andong
44	ADMIN KECAMATAN KLEGO	admin_kec_klego
45	ADMIN KECAMATAN KARANGGEDE	admin_kec_karanggede
46	ADMIN KECAMATAN WONOSEGORO	admin_kec_wonosegoro
47	ADMIN KECAMATAN KEMUSU	admin_kec_kemusu
48	ADMIN KECAMATAN JUWANGI	admin_kec_juwangi
49	ADMIN KECAMATAN GLADAGSARI	admin_kec_gladangsari
50	ADMIN KECAMATAN TAMANSARI	admin_kec_tamansari
51	ADMIN KECAMATAN WONOSAMODRO	admin_kec_wonosamodro
52	ADMIN DINAS KETAHANAN PANGAN	admin_dkp
53	ADMIN SETWAN	admin_dprd
54	ADMIN SETDA	admin_setda
55	PERUMDA TIRTA AMPERA	perumda_tirta_ampera
56	PT ANEKA KARYA	pt_aneka_karya
57	PT BPR BANK BOYOLALI	pt_bpr_bank_boyolali
58	PT BPR BKK BOYOLALI	pt_bpr_bkk_boyolali
59	LABKES	labkes
60	PUSKESMAS AMPEL	puskesmas_ampel
61	PUSKESMAS ANDONG	puskesmas_andong

62	PUSKESMAS BANYUDONO 1	puskesmas_banyudono_1
63	PUSKESMAS BANYUDONO 2	puskesmas_banyudono_2
64	PUSKESMAS BOYOLALI 1	puskesmas_boyolali_1
65	PUSKESMAS BOYOLALI 2	puskesmas_boyolali_2
66	PUSKESMAS CEPOGO	puskesmas_cepogo
67	PUSKESMAS GLADAGSARI	puskesmas_gladagsari
68	PUSKESMAS JUWANGI	puskesmas_juwangi
69	PUSKESMAS KARANGGEDE	puskesmas_karanggede
70	PUSKESMAS KEMUSU	puskesmas_kemusu
71	PUSKESMAS KLEGO 1	puskesmas_klego_1
72	PUSKESMAS KLEGO 2	puskesmas_klego_2
73	PUSKESMAS MOJOSONGO	puskesmas_mojosongo
74	PUSKESMAS MUSUK	puskesmas_musuk
75	PUSKESMAS NGEMPLAK	puskesmas_ngemplak
76	PUSKESMAS NOGOSARI	puskesmas_nogosari
77	PUSKESMAS SAMBI	puskesmas_sambi
78	PUSKESMAS SAWIT	puskesmas_sawit
79	PUSKESMAS SELO	puskesmas_selo
80	PUSKESMAS SIMO	puskesmas_simo
81	PUSKESMAS TAMANSARI	puskesmas_tamansari
82	PUSKESMAS TERAS	puskesmas_teras
83	PUSKESMAS WONOSAMODRO	puskesmas_wonosamodro
84	PUSKESMAS WONOSEGORO	puskesmas_wonosegoro
85	SKB BOYOLALI	skb_boyolali
86	SMPN 1 AMPEL	smpn_1_ampel
87	SMPN 1 ANDONG	smpn_1_andong
88	SMPN 1 BANYUDONO	smpn_1_banyudono
89	SMPN 1 BOYOLALI	smpn_1_boyolali
90	SMPN 1 CEPOGO	smpn_1_cepogo
91	SMPN 1 GLADAGSARI	smpn_1_gladagsari
92	SMPN 1 JUWANGI	smpn_1_juwangi
93	SMPN 1 KARANGGEDE	smpn_1_karanggede
94	SMPN 1 KEMUSU	smpn_1_kemusu
95	SMPN 1 KLEGO	smpn_1_klego
96	SMPN 1 MOJOSONGO	smpn_1_mojosongo
97	SMPN 1 MUSUK	smpn_1_musuk

98	SMPN 1 NGEMPLAK	smpn_1_ngemplak
99	SMPN 1 NOGOSARI	smpn_1_nogosari
100	SMPN 1 SAMBI	smpn_1_sambi
101	SMPN 1 SAWIT	smpn_1_sawit
102	SMPN 1 SELO	smpn_1_selo
103	SMPN 1 SIMO	smpn_1_simo
104	SMPN 1 TAMANSARI SATAP	smpn_1_tamansari_satap
105	SMPN 1 TERAS	smpn_1_teras
106	SMPN 1 WONOSEGORO	smpn_1_wonosegoro
107	SMPN 2 AMPEL	smpn_2_ampel
108	SMPN 2 ANDONG	smpn_2_andong
109	SMPN 2 BANYUDONO	smpn_2_banyudono
110	SMPN 2 BOYOLALI	smpn_2_boyolali
111	SMPN 2 CEPOGO	smpn_2_cepogo
112	SMPN 2 GLADAGSARI SATAP	smpn_2_gladagsari_satap
113	SMPN 2 JUWANGI	smpn_2_juwangi
114	SMPN 2 KARANGGEDE	smpn_2_karanggede
115	SMPN 2 KEMUSU	smpn_2_kemusu
116	SMPN 2 KLEGO	smpn_2_klego
117	SMPN 2 MOJOSONGO	smpn_2_mojosongo
118	SMPN 2 MUSUK	smpn_2_musuk
119	SMPN 2 NGEMPLAK	smpn_2_ngemplak
120	SMPN 2 NOGOSARI	smpn_2_nogosari
121	SMPN 2 SAMBI	smpn_2_sambi
122	SMPN 2 SAWIT	smpn_2_sawit
123	SMPN 2 SELO	smpn_2_selo
124	SMPN 2 SIMO	smpn_2_simo
125	SMPN 2 TERAS	smpn_2_teras
126	SMPN 2 WONOSEGORO	smpn_2_wonosegoro
127	SMPN 3 BOYOLALI	smpn_3_boyolali
128	SMPN 3 CEPOGO SATAP	smpn_3_cepogo_satap
129	SMPN 3 JUWANGI SATAP	smpn_3_juwangi_satap
130	SMPN 3 MOJOSONGO	smpn_3_mojosongo
131	SMPN 3 SAWIT	smpn_3_sawit
132	SMPN 3 SIMO	smpn_3_simo
133	SMPN 3 TERAS	smpn_3_teras

134	SMPN 4 BOYOLALI	smpn_4_boyolali
135	SMPN 4 MOJOSONGO	smpn_4_mojosongo
136	SMPN 5 BOYOLALI	smpn_5_boyolali
137	SMPN 6 BOYOLALI	smpn_6_boyolali
138	KELURAHAN SISWODIPURAN	kelurahan_siswodipuran
139	KELURAHAN PULISEN	kelurahan_pulisen
140	KELURAHAN BANARAN	kelurahan_banaran
141	KELURAHAN MOJOSONGO	kelurahan_mojosongo
142	KELURAHAN KEMIRI	kelurahan_kemiri
143	KELURAHAN SAMBENG	kelurahan_sambeng
144	CANDI	desa_candi
145	URUTSEWU	desa_urutsewu
146	KALIGENTONG	desa_kaligentong
147	TANDUK	desa_tanduk
148	BANYUANYAR	desa_banyuanyar
149	SIDOMULYO	desa_sidomulyo
150	SELODOKO	desa_selodoko
151	NGARGOSARI	desa_ngargosari
152	NGAMPON	desa_ngampon
153	NGENDEN	desa_ngenden
154	GONDANGSLAMET	desa_gondangslamet
155	ANDONG	desa_andong
156	BEJI	desa_beji
157	GONDANGRAWE	desa_gondangrawe
158	KADIPATEN	desa_kadipaten
159	KACANGAN	desa_kacangan
160	KEDUNGDOWO	desa_kedungdowo
161	KUNTI	desa_kunti
162	MOJO	desa_mojo
163	MUNGGUR	desa_munggur
164	PAKANG	desa_pakang
165	PAKEL	desa_pakel
166	PELEMREJO	desa_pelemrejo
167	PRANGGONG	desa_pranggong
168	SEMAWUNG	desa_semawung
169	SEMPU	desa_sempu

170	SENGGRONG	desa_senggrong
171	BANYUDONO	desa_banyudono
172	BATAN	desa_batan
173	BANGAK	desa_bangak
174	BENDAN	desa_bendan
175	DENGGUNGAN	desa_denggungan
176	JEMBUNGAN	desa_jembungan
177	JIPANGAN	desa_jipangan
178	DUKUH	desa_dukuh
179	KETAON	desa_ketaon
180	KUWIRAN	desa_kuwiran
181	NGARU	desa_ngaru
182	SAMBON	desa_sambon
183	TANJUNGSARI	desa_tanjungsari
184	CANGKRINGAN	desa_cangkringan
185	TRAYU	desa_trayu
186	KIRINGAN	desa_kiringan
187	MUDAL	desa_mudal
188	KEBONBIMO	desa_kebonbimo
189	PENGGUNG	desa_penggung
190	WINONG	desa_winong
191	KARANGGENENG	desa_karanggeneng
192	CEPOGO	desa_cepogo
193	SUKABUMI	desa_sukabumi
194	GENTING	desa_genting
195	KEMBANGKUNING	desa_kembangkuning
196	GUBUG	desa_gubug
197	CABEANKUNTI	desa_cabeankunti
198	CANDIGATAK	desa_candigatak
199	BAKULAN	desa_bakulan
200	JELOK	desa_jelok
201	MLIWIS	desa_mliwis
202	PARAS	desa_paras
203	SUMBUNG	desa_sumbung
204	GEDANGAN	desa_gedangan
205	WONODOYO	desa_wonodoyo

206	JOMBONG	desa_jombong
207	CERME	desa_cerme
208	JUWANGI	desa_juwangi
209	JERUKAN	desa_jerukan
210	KALIMATI	desa_kalimati
211	KAYEN	desa_kayen
212	KROBOKAN	desa_krobokan
213	NGAREN	desa_ngaren
214	NGLESES	desa_ngleses
215	PILANGREJO	desa_pilangrejo
216	BANGKOK	desa_bangkok
217	BANTENGAN	desa_bantengan
218	DOLOGAN	desa_dologan
219	GROGOLAN	desa_grogolan
220	KARANGKEPOH	desa_karangkepoh
221	KEBONAN	desa_kebonan
222	KLARI	desa_klari
223	KLUMPIT	desa_klumpit
224	MANYARAN	desa_manyaran
225	MOJOSARI	desa_mojosari
226	PENGKOL	desa_pengkol
227	PINGGIR	desa_pinggir
228	SEMPULUR	desa_sempulur
229	TEGALSARI	desa_tegalsari
230	SRANTEN	desa_sranten
231	SENDANG	desa_sendang
232	GENENGSARI	desa_genengsari
233	GUWO	desa_guwo
234	KEMUSU	desa_kemusu
235	KENDEL	desa_kendel
236	KAUMAN	desa_kauman
237	KLEWOR	desa_klewor
238	LEMAHIRENG	desa_lemahireng
239	SARIMULYO	desa_sarimulyo
240	WATUGEDE	desa_watugede
241	WONOHARJO	desa_wonoharjo

242	BAWU	desa_bawu
243	KEDUNGREJO	desa_kedungrejo
244	KEDUNGMULYO	desa_kedungmulyo
245	BADE	desa_bade
246	BANYUURIP	desa_banyuurip
247	BLUMBANG	desa_blumbang
248	GONDANGLEGI	desa_gondanglegi
249	JATEN	desa_jaten
250	KLEGO	desa_klego
251	KALANGAN	desa_kalangan
252	KARANGMOJO	desa_karangmojo
253	KARANGGATAK	desa_karanggatak
254	SANGGE	desa_sangge
255	SENDANGREJO	desa_sendangrejo
256	SUMBERAGUNG	desa_sumberagung
257	TANJUNG	desa_tanjung
258	BRAJAN	desa_brajan
259	DLINGO	desa_dlingo
260	KRAGILAN	desa_kragilan
261	METUK	desa_metuk
262	BUTUH	desa_butuh
263	JURUG	desa_jurug
264	KARANGNONGKO	desa_karangnongko
265	MADU	desa_madu
266	MANGGIS	desa_manggis
267	TAMBAK	desa_tambak
268	SINGOSARI	desa_singosari
269	MUSUK	desa_musuk
270	SUKORAME	desa_sukorame
271	PUSPORENGGO	desa_pusporenggo
272	KEMBANGSARI	desa_kembangsari
273	RINGINLARIK	desa_ringinlarik
274	KEBONGULO	desa_kebongulo
275	SUKOREJO	desa_sukorejo
276	SRUNI	desa_sruni
277	CLUNTANG	desa_cluntang

278	PAGERJURANG	desa_pagerjurang
279	DIBAL	desa_dibal
280	DONOHUDAN	desa_donohudan
281	GAGAKSIPAT	desa_gagaksipat
282	GIRIROTO	desa_giriroto
283	KISMOYOSO	desa_kismoyoso
284	MANGGUNG	desa_manggung
285	NGARGOREJO	desa_ngargorejo
286	NGESREP	desa_ngesrep
287	PANDEYAN	desa_pandeyan
288	SAWAHAN	desa_sawahan
289	SINDON	desa_sindon
290	SOBOKERTO	desa_sobokerto
291	BENDO	desa_bendo
292	JERON	desa_jeron
293	GLONGGONG	desa_glonggong
294	GULI	desa_guli
295	KEYONGAN	desa_keyongan
296	KETITANG	desa_ketitang
297	KENTENG	desa_kenteng
298	POJOK	desa_pojok
299	POTRONAYAN	desa_potronayan
300	PULUTAN	desa_pulutan
301	REMBUN	desa_rembun
302	SEMBUNGAN	desa_sembungan
303	TEGALGIRI	desa_tegalgiri
304	SAMBI	desa_sambi
305	BABADAN	desa_babadan
306	DEMANGAN	desa_demangan
307	JAGOAN	desa_jagoan
308	JATISARI	desa_jatisari
309	GLINTANG	desa_glintang
310	KEPOH	desa_kepoh
311	NGAGLIK	desa_ngaglik
312	NGLEMBU	desa_nglembu
313	SENTING	desa_senting

314	TAWENGAN	desa_tawengan
315	TEMPURSARI	desa_tempursari
316	CATUR	desa_catur
317	CANDEN	desa_canden
318	CERMO	desa_cermo
319	TROSOBO	desa_trosobo
320	BENDOSARI	desa_bendosari
321	JATIREJO	desa_jatirejo
322	JENENGAN	desa_jenengan
323	GOMBANG	desa_gombang
324	GUWOKAJEN	desa_guwokajen
325	KARANGDUREN	desa_karangduren
326	KEMASAN	desa_kemasan
327	KATEGUHAN	desa_kateguhan
328	MANJUNG	desa_manjung
329	CEPOKOSAWIT	desa_cepokosawit
330	TEGALREJO	desa_tegalrejo
331	TLAWONG	desa_tlawong
332	JERUK	desa_jeruk
333	JRAKAH	desa_jrakah
334	KLAKAH	desa_klakah
335	SAMIRAN	desa_samiran
336	LENCOH	desa_lencoh
337	SELO	desa_selo
338	SENDEN	desa_senden
339	SUROTELENG	desa_suroteleng
340	TARUBATANG	desa_tarubatang
341	TLOGOLELE	desa_tlogolele
342	SIMO	desa_simo
343	BENDUNGAN	desa_bendungan
344	BLAGUNG	desa_blagung
345	KEDUNGLENGKONG	desa_kedunglengkong
346	PENTUR	desa_pentur
347	PELEM	desa_pelem
348	SUMBER	desa_sumber
349	TALAKBROTO	desa_talakbroto

350	TEMON	desa_temon
351	TETER	desa_teter
352	WALEN	desa_walen
353	WATES	desa_wates
354	GUNUNG	desa_gunung
355	TERAS	desa_teras
356	TAWANGSARI	desa_tawangsari
357	SUDIMORO	desa_sudimoro
358	SALAKAN	desa_salakan
359	RANDUSARI	desa_randusari
360	NEPEN	desa_nepen
361	MOJOLEGI	desa_mojolegi
362	KRASAK	desa_krasak
363	KOPEN	desa_kopen
364	KADIRESO	desa_kadireso
365	GUMUKREJO	desa_gumukrejo
366	DOPLANG	desa_doplang
367	BANGSALAN	desa_bangsalan
368	BANDUNG	desa_bandung
369	BANYUSRI	desa_banyusri
370	BOLO	desa_bolo
371	BOJONG	desa_bojong
372	GOSONO	desa_gosono
373	KARANGJATI	desa_karangjati
374	KETOYAN	desa_ketoyan
375	WONOSEGORO	desa_wonosegoro
376	KAUMAN	desa_kauman
377	LEMAHIRENG	desa_lemahireng
378	LAMPAR	desa_lampar
379	DRAGAN	desa_dragan
380	KARANGANYAR	desa_karanganyar
381	JEMOWO	desa_jemowo
382	SUMUR	desa_sumur
383	SANGUP	desa_sangup
384	MRIYAN	desa_mriyan
385	LANJARAN	desa_lanjaran

386	KARANGKENDAL	desa_karangkendal
387	KEPOSONG	desa_keposong
388	SEBOTO	desa_seboto
389	KALIGENTONG	desa_kaligentong
390	GLADAKSARI	desa_gladaksari
391	KEMBANG	desa_kembang
392	NGAGRONG	desa_ngagrong
393	CANDISARI	desa_candisari
394	NGARGOLOKA	desa_ngargoloka
395	SAMPETAN	desa_sampetan
396	NGADIREJO	desa_ngadirojo
397	JLAREM	desa_jlarem
398	NGABLAK	desa_ngablak
399	KEDUNGPILANG	desa_kedungpilang
400	KALINANAS	desa_kalinanas
401	GILIREJO	desa_gilirejo
402	GARANGAN	desa_garangan
403	BERCAK	desa_bercak
404	BENGLE	desa_bengle
405	GUNUNGSARI	desa_gunungsari
406	REPAKING	desa_repaking
407	JATILAWANG	desa_jatilawang
408	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC BOYOLALI	paud_dikdasls_kec_boyolali
409	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC MOJOSONGO	paud_dikdasls_kec_mojosongo
410	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC TERAS	paud_dikdasls_kec_teras
411	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC BANYUDONO	paud_dikdasls_kec_banyudono
412	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC SAWIT	paud_dikdasls_kec_sawit
413	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC MUSUK	paud_dikdasls_kec_musuk
414	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC TAMANSARI	paud_dikdasls_kec_tamansari
415	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC CEPOGO	paud_dikdasls_kec_cepogo
416	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC SELO	paud_dikdasls_kec_selo
417	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC AMPEL	paud_dikdasls_kec_ampel
418	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC GLADAGSARI	paud_dikdasls_kec_gladagsari
419	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC KARANGGEDE	paud_dikdasls_kec_karanggede
420	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC WONOSEGORO	paud_dikdasls_kec_wonosegoro
421	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC	paud_dikdasls_kec_wonosamodr

	WONOSAMODRO	o
422	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC JUWANGI	paud_dikdasls_kec_juwangi
423	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC KEMUSU	paud_dikdasls_kec_kemusu
424	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC ANDONG	paud_dikdasls_kec_andong
425	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC KLEGO	paud_dikdasls_kec_klego
426	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC NOGOSARI	paud_dikdasls_kec_nogosari
427	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC NGEMPLAK	paud_dikdasls_kec_ngemplak
428	KOORDINATOR PAUD DIKDAS DAN LS KEC SAMBI	paud_dikdasls_kec_sambi

2. **Lampiran Foto Kegiatan**

Serah Terima IA yang telah Ditandatangani Oleh Kepala Bapperida Kabupaten Boyolali	Apel Pagi
Perdana Magang	Operasional BI-SMART

Mengerjakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Mengerjakan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Membuat Desigh PPT	Mengikuti Jumat Bersih
Mengcrosscheck Kaos Lomba Krenova 2025	Ikut Serta Menjadi Panitia Lomba Krenova 2025 (Day1)

Ikut Serta Menjadi Panitia Lomba Krenova 2025 (Day2) 	Mengcrosscheck dan Membuat Form Inovasi Peserta Lomba Krenova 2025
Menjadi Panitia bagian Registrasi Lomba Krenova 2025 	Menjadi Talent Saat Pembuatan Video Ramadan 2025